

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mendefinisikan nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Bermata pencaharian hidup sebagai nelayan artinya berusaha memenuhi segala kebutuhan hidup melalui hasil tangkapan yang diperoleh pada saat melaut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melakukan kegiatan penangkapan ikan merupakan sumber mata pencaharian hidup masyarakat yang berada di kawasan pesisir. Masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut disebut sebagai masyarakat nelayan (Kusnadi, 2009: 27).

Masyarakat nelayan di Indonesia tersebar di beberapa pulau salah satunya di kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan salah satu daerah kepulauan yang dianugerahi oleh potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dikarenakan wilayahnya 80 persen adalah lautan yaitu sebesar 65.301 km² sedangkan wilayah daratan hanya 16.424 km² (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Luasnya wilayah lautan dibandingkan daratan menjadikan sektor perikanan sebagai sektor primadona masyarakat pesisir Bangka Belitung.

Masyarakat pesisir Bangka Belitung tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya di pantai Desa Batu Belubang yang memiliki fungsi sebagai pantai perikanan tangkap. Selain itu pantai tersebut merupakan salah satu pusat ikan laut segar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga sudah sewajarnya masyarakat pesisir Batu Belubang memanfaatkan potensi tersebut dengan cara bermata pencaharian hidup sebagai nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Menurut Adiatma (2013: 2), wilayah pesisir merupakan wilayah paling rentan terkena dampak perubahan iklim sebab berbatasan langsung dengan laut serta wilayah dataran rendah yang ada di sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi pemukiman nelayan di sepanjang pesisir Batu Belubang yang berbatasan langsung dengan wilayah laut. Pemukiman di sepanjang pesisir pantai tersebut menunjukkan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan pada umumnya yang identik dengan kerentanan, kemiskinan dan ketidakberdayaan. Pada saat musim tertentu seperti musim utara dan tenggara, pemukiman masyarakat nelayan yang berada di wilayah perbatasan pesisir akan terancam oleh gelombang tinggi dan cuaca buruk yang akan membahayakan kehidupan mereka. Dengan demikian sampai saat ini, masyarakat nelayan masih identik dengan kerentanan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Fery Joko Juliantoro, sosiolog yang fokus penelitiannya mengenai kondisi nelayan, mengatakan bahwa nelayan merupakan

kelompok paling miskin di negara ini, dengan tingkat kemiskinan paling akut (Puryono, 2017: 70).

Faktor selanjutnya yang menjadi basis ekonomi kehidupan nelayan diantaranya yaitu ketersediaan sumber daya perikanan yang bergantung pada fluktuasi musim, sifat sumber daya perikanan yang bergerak dinamis karena pengaruh perubahan alam dan lingkungan, dan berbagai jenis resiko yang bakal terjadi dalam kegiatan penangkapan ikan (Kusnadi, 2007: 9). Sehingga kehidupan nelayan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi alam, melainkan juga disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Berkenaan dengan aktivitas yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, salah satunya yaitu aktivitas tambang inkonvensional atau lebih dikenal dengan istilah *TI Apung* di wilayah pesisir pantai Desa Batu Belubang bukan merupakan fenomena asing lagi dan bahkan sudah menjadi mata pencaharian peralihan nelayan dalam menghadapi perubahan iklim. Menurut Adiatma (2013: 157), adanya fenomena peralihan mata pencaharian nelayan tangkap ke *TI Apung* (tambang inkonvensional) baik yang sifatnya sampingan, sementara, maupun permanen menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan di pesisir pantai Batu Belubang.

Kondisi lingkungan pantai perikanan tangkap di Desa Batu Belubang yang sudah sejak beberapa tahun lalu mengalami perubahan fungsi dari pantai perikanan tangkap menjadi menjadi wilayah *tambang inkonvensional*

bukan sebuah fenomena yang baru lagi. Hal yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa wilayah pesisir pantai Batu Belubang sampai saat ini masih terus mengalami fenomena yang sempat mencuat yakni fenomena tambang inkonvensional (*TI Apung*). fenomena peralihan mata pencaharian nelayan tangkap ke nelayan apung tersebut merupakan strategi adaptasi yang dipilih oleh nelayan Batu Belubang dalam menghadapi perubahan iklim (Adiatma, 2013: 157). Adanya fenomena peralihan mata pencaharian nelayan tangkap ke *TI Apung* (tambang inkonvensional) baik yang sifatnya sampingan, sementara, maupun permanen menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan di pesisir pantai Batu Belubang.

Beberapa hal tersebut diatas yang kemudian menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat nelayan pesisir pantai Desa Batu Belubang semakin penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Masyarakat pesisir pantai Batu Belubang yang bermata pencaharian hidup sebagai nelayan membutuhkan jaminan secara sosial maupun ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di berbagai aspek. Sampai saat ini belum ada instansi/ lembaga formal yang mampu menjamin kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Dengan demikian mereka yang bermata pencaharian hidup sebagai nelayan lebih memilih untuk membangun hubungan kerja sama dengan pemilik modal yang mereka rasa dapat menjamin keselamatan ekonomi mereka. Hubungan sosial dalam masyarakat nelayan umumnya berciri ikatan patron-klien yang kuat (Satria, 2015: 39). Kuatnya ikatan patron klien tersebut kemudian melahirkan pola-pola yang berbeda pada

tiap-tiap daerah yang masyarakatnya bermata pencaharian hidup sebagai nelayan.

Berdasarkan hasil pra observasi peneliti, mayoritas nelayan di Desa Batu Belubang adalah nelayan bagan dengan status kepemilikan alat tangkap bukan milik pribadi/ sewa/ kredit. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan merujuk pada penelitian Adimesa (2018), bahwa nelayan di Desa Batu Belubang belum memiliki alat tangkap sendiri atau masih berstatus bukan pemilik dan kredit, dengan presentase sebesar 61 persen. Sedangkan untuk nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri persentasenya hanya sebesar 39 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nelayan di desa batu belubang belum memiliki alat tangkap sendiri.

Pada umumnya masyarakat nelayan di Desa Batu Belubang dibagi menjadi dua kelompok yaitu nelayan pesisir dan nelayan bagan. Nelayan pesisir merupakan nelayan yaitu nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pesisir sedangkan nelayan bagan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan nelayan pesisir. Nelayan bagan di Desa Batu Belubang terdiri dari nelayan bagan tancap, bagan apung/ drum dan nelayan bagan perahu/ kapal. Hal ini yang kemudian menarik peneliti untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana pola hubungan patron klien yang terjalin pada masyarakat nelayan bagan di pesisir pantai Desa Batu Belubang. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian “Pola Hubungan Patron-Klien Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pola hubungan patron-klien pada masyarakat nelayan di Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pola hubungan patron-klien dalam jaminan sosial ekonomi masyarakat nelayan bagan di Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah
2. Untuk mengetahui pola hubungan patron-klien dalam hubungan kerjasama antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap pada masyarakat nelayan bagan di Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah
3. Untuk mengetahui pola hubungan patron-klien dalam praktik bagi hasil pada masyarakat nelayan bagan di Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Bagi perkembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan dalam penelitian berikutnya serta sebagai inventarisasi di bidang ilmu sosiologi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan peran lembaga keuangan pada masyarakat nelayan selama ini. Dengan harapan kebijakan yang diambil pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan di sektor kelautan dan perikanan. Sehingga kebijakan yang diambil menjadi efektif dalam mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap di Desa Batu Belubang.

b. Bagi masyarakat nelayan di Desa Batu Belubang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai permasalahan yang di alami masyarakat nelayan Desa Batu Belubang saat ini, serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam menciptakan solusi terhadap kondisi sosial ekonomi yang mereka alami saat ini.